

POTENSI BUDAYA MASYARAKAT PADA LEVEL KELURAHAN DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI ADMINISTRASI

Engkus¹, Muhammad Rizal Sidiq², Muhammad Yusuf Sulaeman³, Nurul Sofiah⁴

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ¹engkus@uinsgd.ac.id, ²rizalsidiq17@gmail.com, ³ysulaeman14@gmail.com,
⁴sofiahnurul4@gmail.com

Abstrak

Tinjauan ekologi terhadap perkembangan administrasi mencoba mendeskripsikan hubungan antara lingkungan (*environment*) tempat administrasi tersebut tumbuh dan berkembang dengan administrasi yang dianggap sebagai organisme hidup. Pelaksanaan administrasi dewasa ini perlu mendapat perhatian dimana faktor ekologis atau lingkungan selalu mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan di daerah khususnya yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses ekologi administrasi dan pelayanan publik di kantor Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Masalah penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ekologi administrasi di lingkungan Kelurahan Cipadung lebih menitikberatkan pada budaya, karena Kelurahan Cipadung memiliki potensi yang besar pada bidang tersebut.

Kata Kunci: *Budaya Masyarakat, Ekologi Administrasi, Pelayanan Publik*

Abstract

An ecological review of administrative development tries to describe the relationship between the environment in which the administration grows and develops and the administration that is considered a living organism. The implementation of today's administration needs attention where ecological or environmental factors always affect the implementation of government in the regions, especially those related to the provision of services to the community. The purpose of this study was to determine the ecological process of administration and public services at the office of Kelurahan Cipadung, District Cibiru, Bandung City. The problem of this research is the method used in this study is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques in this study are observation, interviews and literature study. The results of the study indicate that the administrative ecological process in the Cipadung Village environment focuses more on culture because Cipadung Village has great potential in this field.

Keywords: *Community Culture, Administrative Ecology, Public Service*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme hidup/makhluk hidup dengan lingkungannya maka administrasi dapat pula dipandang sebagai organisme hidup yang dipengaruhi dan mempengaruhi keadaan lingkungan. Dengan kata lain, ada hubungan timbal balik antara administrasi dan lingkungan atau faktor-faktor ekologi tersebut (Anggara, 2018).

Adapun menurut Sitanggang (1997) mendefinisikan “ekologi” sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara lingkungan dan faktor-faktornya, hubungan antarfaktor lingkungan sendiri, dan hubungan antarunsur suatu faktor dengan selamanya, serta hubungan dengan lingkungannya (Sitanggang, 1997).

Faktor-faktor ekologi yang ada dewasa ini tidak dapat dipisahkan dalam praktik administrasi publik khususnya berkaitan dengan pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan orientasi administrasi publik adalah bagaimana dapat memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat. Adapun faktor-faktor ekologi tersebut yaitu sosial budaya, agama, politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan yang mana sangat berkaitan erat dengan sistem administrasi publik.

Selain itu, faktor-faktor ekologis juga terdiri atas: dasar-dasar ekonomi, struktur sosial, jaringan komunikasi, pola-pola ideologi/symbol, dan sistem politik. Faktor-faktor ekologis ini mempengaruhi secara timbal balik suatu sistem administrasi Negara, baik di negara-negara agrarian maupun industri (Engkus, Administrasi Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik, 2017).

Pemerintah sebagai salah satu pelaku penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan masyarakat karena masyarakat/rakyat pada dasarnya memiliki hak-hak dasar, yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat memenuhinya atau paling tidak terjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini, pelaksanaan administrasi pemerintahan perlu mendapat perhatian dimana faktor ekologis atau lingkungan selalu mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan di daerah khususnya yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam era reformasi dan globalisasi dewasa ini, tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap peningkatan kualitas pelayanan semakin kuat, untuk itu perlu terciptanya iklim usaha yang kondusif, yang ditandai dengan kondisi pelayanan yang cepat, tepat, pasti aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik tercermin dalam segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk aktivitas pelayanan dapat bersifat kegiatan administrasi, kegiatan berupa penyediaan barang maupun penyediaan jasa (Engkus, 2018).

Dalam hal ini, peneliti melakukan studi kasus di kantor Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

proses ekologi administrasi dan pelayanan publik di kantor Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

B. KAJIAN TEORI

Ekologi Administrasi

Secara etimologi (asal kata), ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua akar kata, yaitu *oikos* berarti rumah, rumah tangga atau tempat tinggal, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk. Umumnya ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya (Soedjiran Resosoedarmo, 1986).

Kata ekologi diperkenalkan pertama kali oleh Ernest Haeckel, seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Menurut Collins, mendefinisikan “ekologi” sebagai suatu ilmu cabang biologi yang menyelidiki hubungan antara organisme hidup dan lingkungan tempat ia hidup (Collins, 1989). Sedangkan menurut Sitanggang, mendefinisikan “ekologi” sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara lingkungan dan faktor-faktornya, hubungan antarfaktor lingkungan sendiri, dan hubungan antarunsur suatu faktor dengan selamanya, serta hubungan dengan lingkungannya (Sitanggang, 1997).

Faktor-faktor ekologis administrasi negara dapat dilihat dari aspek-aspek kehidupan nasional yang terdiri atas dua aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan. Riggs membagi faktor ekologis ke dalam beberapa aspek berikut, yaitu: Aspek alamiah terdiri dari: (a) Lokasi dan posisi geografi, (b) Keadaan dan kekayaan alam, dan (c) Keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek kemasyarakatan terdiri dari: (a) Ideologi, (b) Politik, (c) Ekonomi, (d) Sosial budaya, dan (e) Militer (Pamudji, 2004).

Adapun pengertian administrasi secara sempit berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda), meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, pembuatan agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam arti sempit tersebut, administrasi adalah kegiatan yang bersifat tulis-menulis. Dengan demikian, administrasi dapat dipandang sebagai kegiatan tata usaha, seperti mengetik, mengirim surat, dan menyimpan arsip. Dalam arti luas, administrasi meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Siagian, Administrasi dan Pembangunan, 1976).

Menurut Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Terry, 1986). Sedangkan menurut Siagian, menjelaskan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1994).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama dalam suatu organisasi antara dua orang atau lebih berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Tinjauan ekologi terhadap perkembangan administrasi berarti tinjauan yang mencoba menerangkan hubungan antara lingkungan (*environment*) tempat administrasi itu tumbuh dan berkembang dengan administrasi yang dianggap sebagai organisme hidup tersebut. Dengan kata lain, tinjauan ekologis ingin menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap administrasi maupun sebaliknya.

Dalam hal ini, terdapat hubungan antara administrasi dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial yang ada, unsur budaya merupakan unsur yang paling

banyak memengaruhi penampilan (*performance*) administrasi publik. Hal tersebut dikarenakan administrasi publik merupakan ilmu sosial yang bersifat dinamis, yang setiap saat dapat mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, peradaban, dan teknologi.

Agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan ataupun dalam rangka menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, pembentukan, kesimpangsiuran dan/atau kekacauan. Koordinasi antar-kegiatan aparatur pemerintah harus dilakukan mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, dan pengendaliannya (Anggara, 2018). Dalam hal ini diharapkan agar setiap kegiatan administrasi dapat dilakukan demi kepentingan umum dan kemakmuran rakyat.

Pelayanan Publik

Pamudji menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara Negara/ pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, dan badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik.

Dalam pelayanan publik terdapat sepuluh prinsip pelayanan umum yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana kerja, kemudahan akses, kedisiplinan, kenyamanan. (Kemenpan,2003). Keberadaan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni: Pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan); Kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan. Dalam hal ini, Irfan Islamy (1999) menyebut beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik dalam aspek internal organisasi yaitu: (a) Prinsip aksestabilitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan), (b) Prinsip kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut, (c) Prinsip teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan, (d) Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas, (e) Prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (Engkus, 2015).

C. METODE PENELITIAN

ARTIKEL

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Metode ini merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Selain itu, penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang serta perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Informan penelitian ini yaitu Bapak LUKM selaku Lurah/Kasatlinmas Kelurahan Cipadung.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru merupakan salah satu bagian wilayah pemerintah Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 105 Ha. Secara administratif Kelurahan Cipadung dibatasi oleh: (a) Bagian Selatan: Kelurahan Cipadung Wetan Kec. Panyileukan, (b) Bagian Utara: Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru, (c) Bagian Timur: Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru, dan (d) Bagian Barat : Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru.

Secara geografis Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru ini memiliki bentuk wilayah berombak sebesar 25% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Cipadung berada pada ketinggian 700 m di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kelurahan Cipadung berkisar 27° C, sedangkan dilihat dari segi curah hujan berkisar 2400 m/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 90 hari.

No.	Jumlah RW	Jumlah RT
1	RW 01	6 RT
2	RW 02	6 RT
3	RW 03	3 RT
4	RW 04	4 RT
5	RW 05	4 RT
6	RW 06	3 RT
7	RW 07	4 RT
8	RW 08	4 RT
9	RW 09	4 RT
10	RW 10	3 RT
11	RW 11	4 RT
12	RW 12	5 RT
13	RW 13	7 RT
14	RW 14	7 RT
15	RW 15	8 RT
16	RW 16	4 RT
17	RW 17	7 RT
JUMLAH		83 RT

Tabel 1. Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Cipadung
Sumber: Kantor Lurah Cipadung, 2020

Kelurahan Cipadung memiliki jumlah penduduk 19.739 jiwa pada tahun 2016 terdiri dari 9.589 jiwa laki-laki dan 10.150 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Kelurahan Cipadung saat ini mencapai sekitar 5.043 KK. Berdasarkan data kependudukan pada Bulan Desember Tahun 2016 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 186 Jiwa per Ha dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

No.	Umur	Jumlah		
		L	P	JUMLAH
1	0-4	571	616	1187
2	5-9	1574	1276	2869
3	10-14	895	880	1775
4	15-19	779	872	1651
5	20-24	770	906	1676
6	25-29	683	861	1544
7	30-34	712	835	1547
8	35-39	764	661	1425
9	40-44	720	814	1534
10	45-49	748	721	1469
11	50-54	534	586	1120
12	55-59	393	481	874
13	60-64	248	388	636
14	>65	222	249	471
JUMLAH		9613	10141	19739

Tabel 2. Jumlah penduduk kelurahan cipadung
Sumber: Kantor Lurah Cipadung, 2020

Proses ekologi administrasi di lingkungan Kelurahan Cipadung lebih menitikberatkan pada budaya, karena Kelurahan Cipadung memiliki potensi yang besar pada bidang tersebut. Dalam hal ini, pemerintah khususnya di lingkup Kelurahan Cipadung senantiasa memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dengan menjalin kerjasama bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung demi mewujudkan Kelurahan Cipadung yang berdaya saing, khususnya pada sektor budaya yang bisa dijadikan alternatif untuk mencari nafkah bagi masyarakat Cipadung.

Masyarakat Cipadung khususnya tidak terlepas dari budaya setiap akan melakukan kegiatan. Kelurahan Cipadung senantiasa memberikan rekomendasi kegiatan maupun surat pengantar kepada Disparbud. Komunikasi yang berjalan di lingkungan kantor Kelurahan Cipadung terjalin dengan baik demi memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dengan menggunakan proses administrasi yang sesuai dengan SOP yang berlaku di kantor Kelurahan Cipadung.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat di kantor Kelurahan Cipadung harus melalui proses administratif yang sesuai dengan SOP yang ada. Seperti surat pengantar dari RT/RW dan KK maupun KTP. Jika ingin melakukan pertunjukkan, harus ada surat izin dari kepolisian ataupun dari dinas terkait.

Kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Cipadung adalah anggaran yang khusus untuk menggelar pembinaan atau membatu kegiatan masyarakat. Sehingga masyarakat harus mencari donasi sendiri untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jika memang perlu anggaran, harus melalui prosedur yang ada.

Proses dan budaya administrasi di lingkungan kelurahan Cipadung tidak dipungut biaya, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus maksimal tanpa mengharap biaya

administratif dari masyarakat. Jika terbukti terdapat pungli, maka akan ditindaklanjuti ataupun bisa mendapatkan teguran dari pimpinan terkait ataupun dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selama pandemi, kegiatan seni budaya dihentikan karena peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung yang mewajibkan menerapkan PPKM. Masyarakat pun mulai merasa jenuh dengan penekanan ataupun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena semua gerak-gerik masyarakat dibatasi. Efek dari aturan tersebut adalah banyak masyarakat yang hilang pekerjaannya dan kesulitan dalam sisi ekonomi.

Dalam penerapan aturan pembatasan kegiatan masyarakat/ PPKM di lingkungan Kelurahan Cipadung, hanya sebatas teguran lisan atau dengan penahanan kartu identitas kependudukan. Berbeda dengan budaya ekologi/lingkungan lain yang menerapkan sanksi dan juga denda berupa uang. Pendekatan yang dilakukan di lingkungan Kelurahan Cipadung adalah pendekatan antar individu masyarakat (emosial), tanpa melibatkan fisik ataupun adu argumentasi dengan masyarakat. Di masa pandemi Covid-19, pelayanan yang diberikan dibatasi hanya sampai pukul 12.00 WIB. Namun jika masyarakat membutuhkan pelayanan, maka akan dilayani dengan batasan tertentu yang telah diterapkan. Karena sebagian karyawan diberlakukan *Work From Home* (WFH).

Pada sisi politik, wilayah Cipadung memiliki pilihan politik yang beragam. Namun hal tersebut tidak menjadikan perbedaan dalam bidang pelayanan yang diberikan. Pemerintah di sektor Kelurahan Cipadung sering mengikuti reses untuk menampung aspirasi yang ada di masyarakat dan mengadakan musrenbang kelurahan. ASN dituntut untuk netral dalam setiap kegiatan yang ada di lingkup birokrasi dan memberikan kebebasan kepada warga masyarakatnya dalam pilihan politiknya masing-masing (kebebasan berpolitik).

E. SIMPULAN

Dari sisi kebudayaan, proses ekologi administrasi di lingkungan Kelurahan Cipadung lebih menitikberatkan pada budaya, karena Kelurahan Cipadung memiliki potensi yang besar pada bidang tersebut. Dalam hal ini, pemerintah khususnya di lingkup Kelurahan Cipadung senantiasa memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dengan menjalin kerjasama bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung demi mewujudkan Kelurahan Cipadung yang berdaya saing, khususnya pada sektor budaya yang bisa dijadikan alternatif untuk mencari nafkah bagi masyarakat Cipadung.

Selama pandemi, kegiatan seni budaya dihentikan karena peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung yang mewajibkan menerapkan PPKM. Masyarakat pun mulai merasa jenuh dengan penekanan ataupun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena semua gerak-gerik masyarakat dibatasi. Efek dari aturan tersebut adalah banyak masyarakat yang hilang pekerjaannya dan kesulitan dalam sisi ekonomi.

Dari sisi pelayanan publik, komunikasi yang berjalan di lingkungan kantor Kelurahan Cipadung terjalin dengan baik demi memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dengan menggunakan proses administrasi yang sesuai dengan SOP yang berlaku di kantor Kelurahan Cipadung. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat di kantor Kelurahan Cipadung harus melalui proses administratif yang sesuai dengan SOP yang ada. Seperti surat pengantar dari RT/RW dan KK maupun KTP. Jika ingin melakukan pertunjukkan, harus ada surat izin dari kepolisian ataupun dari dinas terkait.

Di masa pandemi Covid-19, pelayanan yang diberikan dibatasi hanya sampai pukul 12.00 WIB. Namun jika masyarakat membutuhkan pelayanan, maka akan dilayani dengan batasan tertentu yang telah diterapkan. Karena sebagian karyawan diberlakukan *Work From Home* (WFH).

Sedangkan dari sisi politik, wilayah Cipadung memiliki pilihan politik yang beragam. Namun hal tersebut tidak menjadikan perbedaan dalam bidang pelayanan yang diberikan. Pemerintah di sektor Kelurahan Cipadung sering mengikuti reses untuk menampung aspirasi yang ada di masyarakat dan mengadakan musrenbang kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Ekologi Administrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Collins. (1989). *Dictionary of Phrasal Verbs*. London: Collins Publishers.
- Engkus. (2015). Dampak Komitmen Organisasional Melalui Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dinas-Dinas Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Wilayah Metropolitan Bandung. *lib. uinsgd. ac. id*, 1-133.
- Engkus, E. E. (2017). Budaya Panengen Sebagai Representasi Simbolik Kepemimpinan Desa Cikalong. *Panggung*, 27(2), 157-167. DOI: <http://dx.doi.org/10.26742/panggung.v27i2.257>
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- Engkus. (2018). Optimalisasi Government-Business Partnership (Gbps) Di Era Disruptif Dan Governansi Digital Untuk Mewujudkan Tujuan Nasional Berkelanjutan. *Proceeding Seminar Nasional Business, Government, And The Public: Optimalisasi Government-Business Partnership (Gbps) Di Era Disruptif Dan Governansi Digital Untuk Mewujudkan Tujuan Nasional Berkelanjutan*, 1-20.
- Pamudji, S. (2004). *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (1976). *Administrasi dan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, S. P. (1994). *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Sitanggang, H. (1997). *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soedjiran Resosoedarmo, K. K. (1986). *Pengantar Ekologi*. Bandung: Remadja Karya.
- Terry, G. R. (1986). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumi.